



GUBERNUR JAWA TIMUR

**NOTA PENJELASAN
PENYAMPAIAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN (LKPJ-AMJ) GUBERNUR
JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2018
KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
PROVINSI JAWA TIMUR**

Surabaya, 5 November 2018

YANG KAMI HORMATI,

SAUDARA KETUA DPRD BESERTA PARA WAKIL KETUA DPRD
PROVINSI JAWA TIMUR,
DAN SEGENAP PARA ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR,

YANG KAMI HORMATI,

SAUDARA PARA KETUA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR,
SAUDARA PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH DI JAJARAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR,
SAUDARA DARI INSAN PERS,
HADIRIN DAN PARA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

**ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB,
SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.**

Puji syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadiran ALLAH SWT yang senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur, sehingga kami dapat menghadiri agenda sidang paripurna mengenai penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 kepada DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pada sidang paripurna penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 pada hari ini, ijin kami selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur baik atas nama Pribadi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghaturkan ucapan terima kasih kepada Segenap Anggota DPRD Yang Terhormat yang mengagendakan sidang paripurna LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 sebagai entitas pertanggungjawaban kami selama 5 (lima) tahun masa bakti jabatan.

Penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan pada hari ini merupakan moment yang sangat baik dan tepat bagi kami untuk menyampaikan rasa puji syukur kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat, hidayah dan karunia-NYA kami telah mampu menjalankan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Jawa Timur Tahun 2014-2019 sekaligus mempertanggungjawabkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dihadapan Seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat sebagai representasi masyarakat Jawa Timur.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, Seluruh Pimpinan di Jajaran Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang telah bekerjasama dengan baik, dan dukungan serta semangat yang mendorong kami untuk berkreasi dalam memajukan Jawa Timur. Selain itu, terima kasih kepada seluruh Pimpinan Lembaga, Perguruan Tinggi, Institusi, Asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Agama, Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren, Dunia Usaha serta unsur masyarakat yang ada di Jawa Timur.

***PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI
HORMATI,***

Kami menyadari bahwa selama menjalankan tugas dan kewajiban serta kewenangan sebagai Kepala Daerah, tentu ada

beberapa hal yang belum kami capai secara maksimal. Namun, telah banyak diperoleh berbagai jenis dan bidang penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan ini tidak menjadikan kami merasa bangga, namun menjadi pemacu kami untuk berkarya lebih baik. Tujuan pembangunan daerah yang kami laksanakan tidak hanya dari capaian positif pada beberapa bidang dan sektor, melainkan dapat mencapai sasaran di seluruh aspek kehidupan manusia ditengah keterbatasan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Jawa Timur.

Kami patut bersyukur Kepada ALLAH SWT, atas hasil capaian kinerja yang menunjukkan perbaikan dan banyak indikator yang sudah mencapai target, bahkan melampaui target, meskipun lain kami menyadari masih ada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Jawa Timur yang belum sesuai harapan. Dari 11 (sebelas) IKU Pembangunan Jawa Timur 8 (delapan) indikator kinerja utama capaiannya konstan berada diatas target, yaitu Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka,

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial. Sedangkan 3 indikator lainnya, memiliki capaian fluktuatif yaitu Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini dan Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia.

Apabila pencapaian 11 (sebelas) IKU kami kelompokkan ke dalam 3 (tiga) aspek dapat disimpulkan **pertama** dari aspek kesejahteraan masyarakat antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pemerataan Pendapatan (versi Bank Dunia) capaiannya masih fluktuatif. **Kedua** dari aspek kesejahteraan sosial antara lain Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup memiliki capaian yang terus meningkat. **Ketiga** dari aspek kinerja pemerintahan seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial memiliki indikasi positif yang mencerminkan adanya pengakuan positif dari masyarakat terhadap kinerja birokrat.

***PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG KAMI
HORMATI,***

Pengelolaan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari Laporan pertanggungjawaban ini. Kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terus mengalami penguatan. Tahun 2014 APBD berkekuatan 19,58 trilyun rupiah lebih, meningkat 13,59 persen pada tahun 2015 menjadi 22,24 trilyun rupiah lebih, meningkat 7,56 persen pada tahun 2016 menjadi 23,92 trilyun rupiah lebih, meningkat 22,65 persen pada tahun 2017 menjadi 29,34 trilyun rupiah lebih dan pada tahun 2018 sebesar 29,02 trilyun rupiah lebih.

Dari sisi pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, mengalami pertumbuhan yang selengkapnya sebagai berikut:

I. Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah mencapai 14,44 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 meningkat 6,65 persen menjadi 15,40 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 meningkat 3,14 persen

menjadi 15,88 trilyun rupiah lebih, tahun 2017 meningkat 9,07 persen menjadi 17,32 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I sebesar 8,49 trilyun rupiah lebih.

II. Dana Perimbangan

Tahun 2014 Dana Perimbangan mencapai 3,48 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 turun 10,61 persen menjadi 3,11 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 meningkat 190,12 persen menjadi 9,03 trilyun rupiah lebih, tahun 2017 meningkat 38,22 persen menjadi 12,49 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi Dana Perimbangan sampai dengan semester I sebesar 6,85 trilyun rupiah lebih.

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Tahun 2014 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 2,84 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 naik 30,41 persen menjadi 3,71 trilyun rupiah lebih, tahun 2016 turun 97,16 persen menjadi 105,32 milyar rupiah lebih, tahun 2017 turun 44,33 persen menjadi 58,63 milyar rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan semester I sebesar 58,17 milyar rupiah lebih.

Pada Sisi Belanja Daerah, Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 mencapai 20,006 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 naik 14,70 persen menjadi 22,94 trilyun rupiah lebih; tahun 2016 naik 3,98 persen menjadi 23,85 trilyun rupiah lebih; tahun 2017 naik 21,10 persen menjadi 28,89 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi Belanja Daerah sampai dengan semester I sebesar 12,76 trilyun rupiah lebih.

Kemudian, dari sisi Pembiayaan Daerah pada tahun 2014 sebesar 1,68 trilyun rupiah lebih; tahun 2015 naik 31,52 persen menjadi 2,21 Trilyun rupiah lebih; tahun 2016 turun 68,91 persen menjadi 688,67 milyar rupiah lebih; tahun 2017 naik 158,33 persen menjadi 1,77 trilyun rupiah lebih. Tahun 2018 realisasi pembiayaan daerah sampai dengan semester I sebesar 3,33 trilyun rupiah lebih.

Selanjutnya, untuk memudahkan dalam memahami laporan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 penyampaian laporannya telah kami sampaikan dalam bentuk 2 (dua) buku laporan meliputi Buku Nota Penjelasan serta Buku Substansi LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018.

Untuk buku laporan nota penjelasan kami susun dengan sistematika 2 (dua) BAGIAN yaitu BAGIAN I mengenai Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2014-2018. BAGIAN II mengenai Ringkasan Penghargaan dari Pusat yang diterima Gubernur Jawa Timur Tahun 2014-2018. Sedangkan untuk Buku Substansi LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 kami susun dengan sistematika sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 yang memuat antara lain Arah Kebijakan Umum Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, serta Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan. Nota penjelasan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA

Ringkasan Capaian 11 IKU Pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2018

Perlu kami sampaikan bahwa laporan kinerja akhir masa jabatan ini menyampaikan secara garis besar realisasi capaian

kinerja 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2018, meliputi: **Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kesalehan Sosial.**

Selanjutnya kami sampaikan realisasi capaian 11 (sebelas) IKU Pembangunan Jawa Timur Tahun 2014-2018, selengkapnya kami bacakan sebagai berikut:

1. IKU Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Timur selama lima tahun terakhir (2014-2018) terus menunjukkan peningkatan, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2014, total nilai PDRB ADHB Jawa Timur sebesar 1.537,94 triliun rupiah. Selanjutnya terus meningkat pada

tahun 2015-2018, yaitu 1.691,47 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.857,59 trilyun rupiah pada tahun 2016; 2.019,19 trilyun rupiah pada tahun 2017; dan 544,44 trilyun rupiah pada TW II tahun 2018. Sedangkan apabila dihitung atas dasar harga konstan, total nilai PDRB ADHK 2010 Jawa Timur tahun 2014-2018 masing-masing sebesar 1.262,68 trilyun rupiah pada tahun 2014; 1.331,37 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.405,56 trilyun rupiah pada tahun 2015; 1.482,14 trilyun rupiah pada tahun 2017; dan 388,54 trilyun rupiah pada TW II tahun 2018.

Perekonomian Jawa Timur Triwulan II-2018 tumbuh sebesar 5,57 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif kecuali Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,36 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,23 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,88 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara *year on year (y-on-y)* cukup signifikan terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Kondisi ini terutama didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Subkategori Penyediaan Akomodasi dan Subkategori Penyediaan Makan Minum akibat meningkatnya tingkat hunian kamar dan bertambahnya jumlah rumah makan.

Sementara itu dari sisi PDRB Menurut Pengeluaran, semua komponen mengalami akselerasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,65 persen, disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 5,71 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,50 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,13 persen; dan Ekspor Luar Negeri 2,71 persen. Tingginya pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai yaitu pembayaran gaji pokok dan tunjangan ke-14, belanja barang dan belanja barang sosial baik APBN maupun APBD. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan LNPRT

dipengaruhi konsumsi pada bulan ramadhan dan lebaran, pemilihan 19 (sembilanbelas) kepala daerah secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018.

Secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuatif, pada tahun 2014 perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,86 persen. Pada tahun 2015 turun menjadi 5,44 persen, pada tahun 2016 naik menjadi 5,57 persen, kemudian sedikit melambat di tahun 2017 menjadi 5,45 persen dan pada tahun 2018 sampai dengan triwulan II naik menjadi 5,57 persen. Namun selama 5 (lima) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

2. IKU Indeks Gini

Indeks Gini Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir masih berada pada tingkat sedang, yaitu di kisaran 0,30 – 0,50 hal ini nampak dari capaian Indeks Gini Jawa Timur Tahun 2014 sebesar 0,37; tahun 2015 sebesar 0,40; tahun 2016 sebesar 0,40; tahun 2017 sebesar 0,41 dan pada tahun 2018 (Maret) sebesar 0,37.

Kondisi ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menurunkan kesenjangan masyarakat Jawa Timur.

3. IKU Indeks Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokan pemerataan pendapatan versi bank dunia tersebut meliputi 3 (tiga) kategori yaitu kategori ketimpangan Rendah (di atas 17 persen), kategori ketimpangan Sedang (antara 12 – 17 persen) dan kategori ketimpangan Tinggi (dibawah 12 persen).

Perkembangan penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah selama lima tahun terakhir persentase distribusinya berfluktuatif, pada tahun 2014 persentasenya sebesar 18,63 persen, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 16,61 persen dan pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 17,03 persen. Pada tahun 2017 distribusinya mengalami penurunan menjadi 16,49 persen, selanjutnya meningkat menjadi 17,74 persen

pada tahun 2018 (Maret). Berdasarkan pengelompokan distribusi bank dunia, pada tahun 2018 (Maret) Jawa Timur masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk pada kategori 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

Peserta Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, berikutnya indikator ke -

4. IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan data BPS, capaian kinerja IPM Jawa Timur selama 4 (empat) tahun terakhir (2014-2017) terus menunjukkan peningkatan, kondisi itu ditunjukkan oleh angka IPM pada tahun 2014 sebesar 68,14; kemudian terus meningkat pada tahun 2015-2017 yaitu masing-masing sebesar 68,95 pada tahun 2015; 69,74 pada tahun 2016; dan 70,27 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia cukup berhasil. Prestasi itu ditunjukkan dari meningkatkan predikat IPM Jawa Timur pada tahun 2017 menjadi

IPM berkategori “tinggi” untuk pertama kalinya. Sebelumnya, dari tahun 2010 hingga tahun 2016 Jawa Timur masih berkategori “sedang”.

Dilihat dari capaian IPM tahun 2014-2018, maka untuk variabel Indikator Pendidikan tercermin dari capaian Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang mencapai sebesar 7,05 tahun pada tahun 2014; 7,14 pada tahun 2015; 7,23 pada tahun 2016 dan mencapai 7,34 pada tahun 2017. Dan Harapan Lama Sekolah yang mencapai sebesar 12,45 pada tahun 2014; 12,66 pada tahun 2015; 12,98 pada tahun 2016 dan mencapai 13,09 pada tahun 2017. Dari variabel Indikator Kesehatan tercermin dari capaian Indikator Angka Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 70,45 tahun, tahun 2015 sebesar 70,68 tahun, tahun 2016 sebesar 70,74 tahun dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 70,80 tahun. Selanjutnya dari variabel Daya Beli Masyarakat tercermin dari Indikator Pengeluaran Per Kapita Penduduk Jawa Timur tahun 2014 mencapai sebesar 10,01 juta per tahun, tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 10,38

juta per tahun, dan tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 10,72 juta per tahun.

5. IKU Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir secara gradual (2014-2018) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.748,42 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2015 angka kemiskinan sebesar 12,28 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.775,97 ribu jiwa, selanjutnya menurun pada tahun 2016 menjadi 11,85 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.638,53 ribu jiwa dan tahun 2017 menjadi 11,20 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.405,27 ribu jiwa dan tahun 2018 (Maret) menjadi 10,98 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 4.332,59 ribu jiwa.

6. IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur tahun 2014-2017 mengalami perkembangan yang menggembirakan. Perkembangan IPG Jawa Timur pada tahun 2014

sebesar 90,83, selanjutnya meningkat pada tahun 2015 menjadi 91,07, kondisi ini menurun pada tahun 2016 menjadi 90,72, kemudian meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 90,76. Naiknya angka IPG Jawa Timur.

Apabila dilihat dari Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Jawa Timur pada kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 68,17; kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 68,41; tahun 2016 menjadi sebesar 69,06 dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 69,37. Kondisi ini menggambarkan peran aktif perempuan di Jawa Timur dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diindikasikan dengan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) tahun 2017 yang mencapai 33,24 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 22 persen dan Persentase Kabupaten/Kota yang membentuk

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja-PUG) yang mencapai 100 persen atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 15 persen.

7. IKU Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur tahun 2014-2018 semakin membaik bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD. TPT pada tahun 2014 sebesar 4,19 persen, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar 4,47 persen. Selanjutnya pada tahun 2016-2018 kondisi ketenagakerjaan menunjukkan keadaan yang lebih baik sehingga terus mengalami penurunan yaitu 4,21 pada tahun 2016; 4,00 pada tahun 2017; dan 3,85 pada tahun 2018 (Februari). Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari 2018 menunjukkan keadaan yang terus lebih baik dibandingkan Agustus 2017 dan Februari 2017. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2018 sebesar 21 juta orang bertambah sebanyak 67 ribu orang

dibanding keadaan Agustus 2017 dan bertambah 114 ribu orang jika dibanding Februari 2017.

Apabila dilihat dari aspek pencari kerja yang ditempatkan, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 54,99 persen, tahun 2015 sebesar 62,00 persen, tahun 2016 sebesar 67,23 persen, tahun 2017 sebesar 68,56 persen. Dengan meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan maka secara tidak langsung akan menurunkan angka pengangguran.

Peserta Sidang Paripurna Yang Kami Hormati, berikutnya indikator ke-

8. IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jawa Timur tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, pada tahun 2014 sebesar 56,48; tahun 2015 naik menjadi sebesar 61,70; tahun 2016 naik menjadi sebesar 63,98;

tahun 2017 naik kembali menjadi sebesar 66,29. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD.

Beberapa variabel dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seperti Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan secara umum juga mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada Indeks Kualitas Air tahun 2014 sebesar 49,11; tahun 2015 sebesar 50,33; tahun 2016 sebesar 52,00 dan tahun 2017 sebesar 52,77. Adapun untuk capaian Indeks Kualitas Udara tahun 2014 sebesar 73,10; tahun 2015 sebesar 89,21; tahun 2016 sebesar 89,25 dan tahun 2017 sebesar 85,49. Selanjutnya dari Indeks Tutupan Lahan Jawa Timur tahun 2014 sebesar 49,47; tahun 2015 sebesar 49,59; tahun 2016 sebesar 54,00; tahun 2017 sebesar 62,02. Kondisi IKLH di Jawa Timur pada tahun 2017 masuk dalam "kategori cukup" (66-74).

9. IKU Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jawa Timur tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup baik, tahun 2014 Indeks Kepuasan Masyarakat Jawa Timur sebesar 79,00;

tahun 2015 naik menjadi sebesar 80,00; tahun 2016 meningkat menjadi 81,00; tahun 2017 meningkat kembali menjadi sebesar 81,33. Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Upaya untuk meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Jawa Timur adalah dengan membentuk model Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 (tujuhbelas) hari.

10. IKU Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Timur Tahun 2014-2017 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, pada tahun 2014 sebesar 61,04; pada tahun 2015 naik menjadi sebesar 61,28; pada tahun 2016 naik signifikan menjadi sebesar 69,54 dan pada tahun 2017 naik kembali menjadi sebesar 71,11. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) di Jawa Timur selama empat tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 73,50 pada tahun 2014; 75,00 pada tahun 2015; 75,73 pada tahun 2016 dan 81,11 pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan indikator kualitas PNS di Jatim lebih terukur, memiliki kredibilitas dan reliabilitas sehingga potensi tiap-tiap PNS disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

11. IKU Indeks Kesalehan Sosial

Capaian Indeks Kesalehan Sosial Jawa Timur Tahun 2017 sebesar 62,34 (angka sangat sementara), besaran indikator ini

mencapai dan melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar diatas 60. Kedepannya Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

BAGIAN KEDUA

Ringkasan Penghargaan dari Pusat

Penghargaan yang mampu diperoleh Provinsi Jawa Timur selama tahun 2014-2018 mencapai lebih dari 100 (seratus) jenis penghargaan dan mencakup beberapa bidang, antara lain: Kesehatan, Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Transportasi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Seni dan Budaya, Pertanian, Investasi, UMKM dan Koperasi, Perekonomian, Ketahanan Pangan, Kewirausahaan, Ketenagakerjaan, Pariwisata,

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta di beberapa bidang lainnya.

Tahun 2014 diperoleh kurang lebih 23 penghargaan yang meliputi bidang pemerintahan, perencanaan, kesehatan, hukum, pelayanan publik, komunikasi, transportasi, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perekonomian, industri, lingkungan hidup, transmigrasi dan investasi.

Tahun 2015 diperoleh kurang lebih 20 (dua puluh) penghargaan, meliputi bidang kesehatan, sosial, pemerintahan, perencanaan, olahraga, perdagangan, industri, kependudukan, perlindungan anak, transportasi, pelayanan publik, penanggulangan bencana, energi, dan kehutanan.

Tahun 2016 diperoleh kurang lebih 24 (duapuluh empat) penghargaan, meliputi bidang politik, ekonomi, pemerintahan, keuangan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

Tahun 2017 diperoleh kurang lebih 25 (duapuluh lima) penghargaan, meliputi pemerintahan, ekonomi, pelayanan publik, koperasi dan UMKM, ketenagakerjaan, pariwisata, perlindungan anak, penanggulangan bencana dan lingkungan hidup.

Tahun 2018 sampai dengan semester I diperoleh kurang lebih 14 (empatbelas) penghargaan, meliputi bidang pemerintahan, ekonomi, kesehatan, perencanaan pembangunan, inovasi, perlindungan anak, jurnalistik, investasi dan pelayanan publik.

Kami menyadari bahwa penghargaan bukanlah tujuan utama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi merupakan sarana pemicu semangat untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga dapat memberikan karya terbaik bagi masyarakat Jawa Timur pada umumnya dan Pemerintah Provinsi pada khususnya.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada seluruh komponen masyarakat Jawa Timur, untuk mempertahankan dan mengembangkan suasana kondusif ini sebagai modal untuk melanjutkan tugas pembangunan di

Jawa Timur pada periode berikutnya, yang semakin tahun permasalahan semakin kompleks.

Demikian Nota Penjelasan Penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 yang dapat kami sampaikan kepada Segenap Anggota DPRD Yang Terhormat. Selanjutnya untuk mencermati ringkasan seluruh substansi materi LKPJ selama 5 (lima) tahun selengkapnya dapat dilihat pada buku 2 (dua) yang telah kami distribusikan sebelum sidang paripurna ini dimulai, yang telah kami sampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 050/13.266/201.5/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 tentang Penyampaian Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2014-2018 kepada DPRD, untuk masing-masing Anggota Dewan dibagikan sebanyak 2 (dua) buku.

PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,

Demikian LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2014-2018 secara garis besar yang dapat kami sampaikan kepada Yang Terhormat

Segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada moment sidang paripurna yang mulia ini, kami berdua (selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur) beserta seluruh pimpinan di jajaran Perangkat Daerah Provinsi di Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang baik selama 10 (sepuluh) tahun berjalan.

Selanjutnya, kami berharap semoga dengan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru periode tahun 2019-2024 mendatang, akan mendapatkan dukungan dan dorongan semangat yang lebih tinggi dari Segenap Anggota DPRD Provinsi yang baru. Dengan kerjasama yang berjalan harmonis, seiring dan sejalan sehingga Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dapat menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur secara seksama, lebih leluasa dan memperoleh hasil yang jauh lebih baik dan lebih berkualitas. Dengan modal kekuatan itu diharapkan pemimpin baru dapat lebih meningkatkan pelayanan umum yang lebih memuaskan serta dapat memberdayakan masyarakat khususnya rakyat miskin dan


termajinalkan sehingga secara riil meningkat kesejahteraannya dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

Sekian laporan LKPJ Akhir Masa Jabatan kami kepada Yang Terhormat Segenap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, terima kasih atas segala perhatiannya, semoga ALLAH SWT senantiasa meridhoi dan menyertai niat baik kita dalam membangun daerah dan memperbaiki pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan, Amiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Billahii Taufiq Wal Hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR JAWA TIMUR



Dr. H. SOEKARWO